BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Governance*

Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 dalam Listyaningsih (2014:84) merumuskan arti *good governance* sebagai berikut:

> "Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat."

Menurut *World Bank* yang dialihbahasakan oleh Mardiasmo (2009:18), *good governance* adalah:

> "Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha."

Dari kedua definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yang mengembangkan dan menerapkan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.1.1.2 Karakteristik *Good Governance*

Menurut UNDP dalam Listyaningsih (2014:85) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah meliputi:

1) Partisipasi *(participation)*
2) Aturan hukum *(rule of law)*
3) Tranparansi *(transparency)*
4) Daya tanggap *(responsiveness)*
5) Berorientasi konsensus *(consensus orientation)*
6) Berkeadilan *(equity)*
7) Efektifitas dan efisiensi *(effectiveness and efficiency)*
8) Akuntabilitas *(accountability)*
9) Visi strategis (*strategic vision*)

Penjelasan dari sembilan karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi (*Participation*)
   Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2) Aturan hukum (*rule of law*)
   Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, tanpa pandang bulu.
3) Transparansi (*Transparency*)
   Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi ke semua unsur yang membutuhkan.
4) Daya tanggap (*responsiveness*)
   Setiap institusi harus tanggap untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5) Berorientasi konsensus (*consensus orientation*)
   Pemerintahan yang baik akan bertindak bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6) Berkeadilan (*Equity*)
   Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki atau perempuan, orang miskin atau kaya dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*)
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8) Akuntabilitas (*Accountabillity*)
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9) Visi strategis (*Strategic vision*)
Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka indikator untuk *good governance* dalam akuntansi sektor publik adalah partisipasi *(participation),* aturan hukum *(rule of law),* tranparansi *(transparency),* daya tanggap *(responsiveness),* berorientasi konsensus *(consensus orientation),* berkeadilan *(equity),* efektifitas dan efisiensi *(effectiveness and efficiency),* akuntabilitas *(accountability),* serta visi strategis (*strategic vision*).

2.1.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Anggaran

Menurut M. Nafarin (2012:19) mengemukakan bahwa:

> "Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang."

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:191) definisi anggaran adalah sebagai berikut:

> "Merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

> Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu."

Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah diubah menjadi *Governmental Accounting Standard Board* (GASB) yang dialihbahasakan oleh Indra Bastian (2010:191), pengertian anggaran adalah sebagai berikut:

> "….Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu."

Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana tahunan tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif, berisi pernyataan perkiraan penerimaan yang diharapkan dan estimasi pengeluaran yang diusulkan untuk membiayai operasi keuangan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2.2 Fungsi Anggaran

Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2012:15) anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain:

1) Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnyadalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
2) Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
3) Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil.
4) Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

5) Anggaran sebagai alat pengawasan yang baik, jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan.

Menurut M. Nafarin (2012:20) manfaat anggaran antara lain:

1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama
2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
3) Dapat memotivasi karyawan.
4) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
6) Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7) Alat pendidikan bagi para manajer.

Indra Bastian (2010:191), mengemukakan fungsi anggaran publik sebagai berikut:

1) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja
2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan
4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi

2.1.2.3 Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Ida Bagus Agung Dharmanegara (2010:80) partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

> "Partisipasi penyusunan anggaran adalah adanya keterlibatan upaya dan input oleh manajer dalam penyusunan anggaran."

Menurut M. Nafarin (2012:11), definisi partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

> "Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada di dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan."

Menurut Sri Rahayu dan Andry Arifian (2013:11), pengertian partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

> "Proses penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh karyawan (manajer pada semua tingkatan) dalam organisasi."

Berdasarkan pengertian partisipasi penyusunan anggaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan upaya aparat pemerintah dalam suatu organisasi publik untuk menentukan dan menyusun anggaran yang ada di dalam divisi atau bagiannya, serta turut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan suatu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran organisasinya.

2.1.2.4 Pengukuran Partisipasi Penyusunan Anggaran

Sesuai dengan teori partisipasi penyusunan anggaran yang sudah dipaparkan, maka dapat ditentukan indikator partisipasi penyusunan anggaran sebagaimana dikutip dari Brownell dalam Falikhatun (2007), yaitu:

1) Keterlibatan
   Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang tercermin dalam penyusunan APBD, dengan tahapan penyusunan rencana kerja anggaran dan persetujuan raperda APBD, proses penyusunan APBD ini melibatkan partisipasi setiap pegawai mulai dari level kasubag hingga kepala dinas. Namun partisipasi anggaran juga secara tidak langsung berdampak pada etika dalam bekerja yaitu tangungjawab dalam anggaran.

2) Pengaruh
Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut.
3) Komitmen
Karena identifikasi dan ego-keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi berkaitan dengan kinerja dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan komitmen terhadap budget.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator partisipasi anggaran, yaitu: keterlibatan para manajer dalam penyusunan anggaran, pengaruh untuk mencapai target anggaran, serta komitmen terhadap pencapaian tujuan anggaran.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2011:262), definisi kinerja adalah sebagai berikut:

> "Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan)."

Sedangkan menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara (2010:9), kinerja adalah sebagai berikut:

> "Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya."

Definisi kinerja menurut Indra Bastian dalam buku Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga (2010: 274) adalah sebagai berikut:

> "Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi."

Dari ketiga definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah gambaran hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program secara kuantitas dan kualitas oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi, dimana hasil kerja tersebut dapat dibuktikan secara konkrit dan dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Muhammad Mahsun (2013:196), pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator kinerja Pemda meliputi:

1) Indikator masukan (*input*)
2) Indikator proses (*process*)
3) Indikator keluaran (*output*)
4) Indikator hasil (*outcome*)
5) Indikator manfaat (*benefit*), dan:
6) Indikator dampak (*impact*)

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator tersebut:

1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

   Misalnya:
   a) Jumlah dana yang dibutuhkan.
   b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
   c) Jumlah infrastruktur yang ada.
   d) Jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator proses

Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi

Misalnya:

a) Ketaatan pada peraturan perundangan.
b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa

3) Indikator keluaran (*output*)

Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik

Misalnya:

a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4) Indikator hasil (*outcome*)

Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Misalnya:

a) Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
b) Produktifitas para karyawan atau pegawai.

5) Indikator manfaat (benefit)

Benefit adalah sesuatu yag terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan

Misalnya:

a) Tingkat kepuasan masyarakat.
b) Tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap tiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan

Misalnya:

a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b) Menurunnya jumlah pengangguran

2.2 Kerangka Pemikiran

Good governance didefinisikan oleh Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Listyaningsih (2014:84) sebagai suatu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan individu dalam proses perancangan anggaran, serta pengaruh bawahan terhadap pembuatan keputusan dalam proses penyusunan anggaran (Milani dalam Stefani dan Stephana, 2011).

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. (Muhammad Mahsun, 2013:25)

2.2.1 Hubungan Antara *Good Governance* Dan Kinerja Pemerintah Daerah

Pemahaman dan penerapan secara komprehensif terhadap prinsip-prinsip *good governance* merupakan salah satu kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh eksekutif dalam mendukung otonomi daerah. (Syamsuddin Haris, 2007:105)

Pemahaman prinsip-prinsip *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja sektor publik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kinerja sektor publik dapat optimal apabila didukung oleh adanya pemahaman prinsip-prinsip *good governance* (Siti Aisyah: 2015).

Budi Mulyawan (2009) dalam Ira Amelia (2015) menyatakan bahwa apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi.

2.2.2 Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Pemerintah Daerah

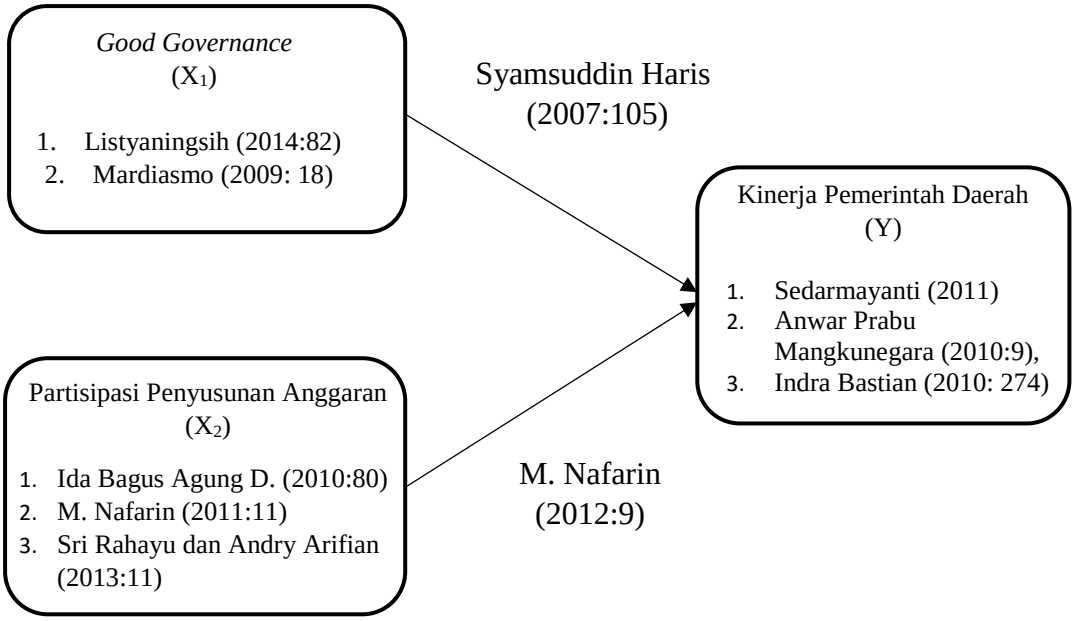
Menurut M. Nafarin (2012:9) partisipasi penyusunan anggaran secara khusus memberi manfaat terhadap kinerja organisasi. Diikutsertakannya manajer dalam proses penyusunan anggaran merupakan bagian terpenting, karena mereka yang paling mengetahui informasi tentang proses penyusunan anggaran.

Partisipasi penyusunan anggaran pada dasarnya mengizinkan manajer tingkat bawah mempertimbangkan bagaimana anggaran dibentuk (Hansen dan Mowen dalam Sisca dkk, 2014). Hal ini berarti bahwa dalam partisipasi penyusunan anggaran, para manajer diberi kesempatan untuk membuat anggaran sesuai dengan bidang dan bagiannya masing-masing. Pada umumnya, tujuan menyeluruh dari anggaran dikomunikasikan kepada para atasan, yang kemudian membantu mengembangkan anggaran yang dapat memenuhi tujuan tersebut. Dari sinilah dapat dilihat bahwa partisipasi penyusunan anggaran itu perlu didalam organisasi guna mewujudkan kinerja yang baik dalam organisasi tersebut (Sisca dkk, 2014).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah salah satu bentuk keterlibatan aparat pemerintah dalam suatu organisasi publik, untuk ikut serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan suatu pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran organisasinya. Dengan diikutsertakannya aparat tersebut dalam penyusunan anggaran akan mendorong

aparat pemerintah tersebut untuk dapat bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diemban sehingga akan meningkatkan kinerjanya (Sandy Widayati, dkk:2015).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Berikut adalah tabel yang menguraikan penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Ira Amelia, Desmiyawati dan Nur Azlina	Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Independen: *Good Governance* Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	G*ood governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

2	Melvi Olinda	Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Independen: *Good governance* Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu.
3	Vini Destriyani	Pengaruh *Good Governance*, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi	Variabel Independen: *Good governance* Variabel Dependen: Kinerja Organisasi	Hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh antara *good governance* terhadap kinerja organisasi.
4	Yuliana Dwi Jayanti	Pengaruh *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Independen: *Good governance* Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	Dapat dikatakan bahwa variabel *Good Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5	Siti Aisyah, Karmizi dan Enni Savitri	Pengaruh *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Independen: *Good governance* Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	*Good governace* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kampar.
6	Karlina Mulyani	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Partisipasi Penyusunan Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
7	Sandy Widayanti, Taufeni Taufik dan Rahmiati Idrus	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap	Variabel Independen: Partisipasi Penyusunan Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan Partisipasi penyusunan anggaran

		Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah		berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
8	Sisca Mutiara Sari, Kirmizi, Yuneita Anisma	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen: Partisipasi Penyusunan Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	Ada pengaruh yang positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
9	Riza Lestari Dra. Vince Ratnawati,Msi,Ak,BKP,CA Drs. H. Rusli,MM,Ak,CA	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Dengan Gaya Kepemimpinan, Desentralisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen: Partisipasi Penyusunan Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Aparat Pemerintah	Variabel partisipasi penyusunan anggaran ini berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
10	Nurhalimah, Darwanis, Syukriy Abdullah	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintah Aceh	Variabel Independen: Partisipasi Penyusunan Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64), hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai asumsi atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang perlu dibuktikan secara statistik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H_1: *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

H_2: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.